



PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT INTEGRITAS: STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS KPK

Vizka Verdani Sudarmadi, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit findings, audit opinions, and transparency on the level of integrity in local governments in Banten Province. The population in this study consists of all local governments in Banten Province during the 2021–2024 period. The sampling method used is saturated sampling with a total of 32 observations. The data used are secondary data obtained from BPK audit reports, official local government websites, and the Corruption Eradication Commission's Integrity Assessment Survey (SPI). The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results show that audit findings, audit opinions, and transparency do not have a significant effect on the integrity level of local governments in Banten Province. These findings indicate that the achievement of good audit opinions and the implementation of transparency have not fully reflected the integrity of local governments.

Keywords: Audit Findings, Audit Opinion, Transparency, Integrity Level

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sektor publik yang mengelola sumber daya dan anggaran dalam jumlah besar. Praktik korupsi dapat menurunkan efektivitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial *Transparency International* (2024). Di Indonesia, upaya pencegahan korupsi terus dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah berdasarkan persepsi pegawai, pengguna layanan, dan para ahli. Audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang dihasilkan melalui temuan audit dan opini audit dapat mencerminkan kualitas pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, dan kewajiban penyajian laporan keuangan. Semakin banyak temuan audit menunjukkan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan yang berpotensi menurunkan integritas

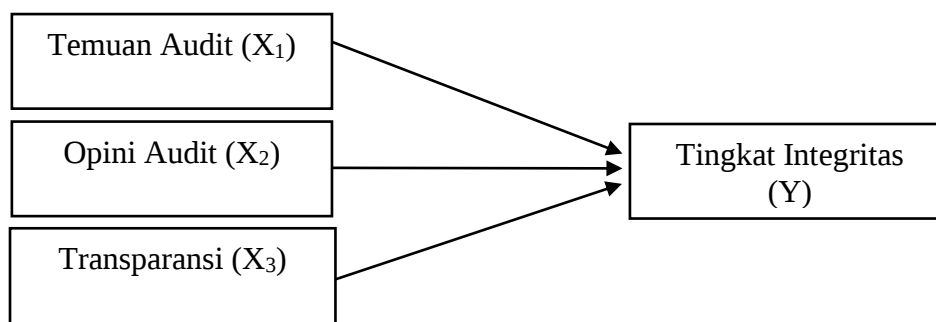
¹ Corresponding author

organisasi. Sebaliknya, opini audit yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan mencerminkan tata kelola yang lebih baik dan tingkat integritas yang lebih tinggi (Arens et al., 2021).

Selain mekanisme audit, transparansi informasi publik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan integritas pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai anggaran, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban pemerintah, sehingga mendorong pengawasan publik dan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Pemerintah daerah yang menyediakan informasi secara terbuka diharapkan memiliki tingkat akuntabilitas dan integritas yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat keterbukaan informasi yang rendah. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa temuan audit, opini audit, dan transparansi dapat memengaruhi kualitas tata kelola dan tingkat korupsi, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, opini audit, dan transparansi terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi integritas pemerintah daerah serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan upaya pencegahan korupsi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal dan agent (C. Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai principal sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agent. Ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan seperti audit dan transparansi untuk mengurangi agency problem.



Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Integritas

Temuan audit menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin rendah kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menurunkan tingkat integritas (Mardiasmo, 2009). Penelitian (Naibaho & Shanti, 2021) juga menunjukkan bahwa temuan audit dapat

mencerminkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

H1: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat integritas

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Integritas

Opini audit diberikan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah, maka diharapkan tingkat integritas semakin tinggi Menurut (Pertiwi & Haryanto, 2022), opini audit dapat digunakan sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

H2: Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat integritas

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Integritas

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Tingkat transparansi yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas Menurut (Mardiasmo, 2022) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. OECD (2020) juga menjelaskan bahwa transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam sektor publik.

H3: Transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat integritas

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang terdiri dari tiga variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu temuan audit, opini audit, dan transparansi. Sedangkan variabel dependen yaitu tingkat integritas. Dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK, website resmi pemerintah daerah, dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Pengukuran temuan audit menggunakan jumlah temuan total SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Pengukuran opini audit menggunakan skala ordinal berdasarkan jenis opini yang diberikan oleh BPK. Pengukuran transparansi menggunakan kelengkapan data yang ada di website masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Banten. Pengukuran tingkat integritas melalui Survei Penilai Integritas yang berbentuk indeks (0-100) yang terdapat pada website KPK.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten periode 2021–2024. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan total 32 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat integritas yang diukur menggunakan nilai SPI KPK. Variabel independen terdiri dari temuan audit, opini audit, dan transparansi.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2021), statistik deskriptif menyajikan sebuah gambaran mengenai data yang tertera pada nilai rerata (mean), standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Analisis statistik deskriptif dipergunakan menggambarkan variabel penelitian, yaitu temuan audit, opini audit, transparansi dan tingkat korupsi.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan memahami apakah variabel pengganggu atau residual model regresi mempunyai sebaran normal (Ghozali, 2021).

2. Uji Multikolinieritas

Tujuan menggunakan uji multikorelasi menelaah apakah regresi ada korelasi antarvariabel bebas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tujuan penggunaan uji heterokedastisitas dipergunakan memahami apakah model regresi ada perbedaan varians residual antar observasi.

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi tujuannya menentukan apakah model regresi ada korelasi residual periode t residual periode terdahulu (Ghozali, 2021).

Uji Hipotesis

2. Uji Simultan (Uji f)

Pengujian simultan dalam model regresi dipergunakan mengevaluasi apakah semua variabel bebas keseluruhan mempengaruhi variabel terikat.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dipergunakan mengetahui dampak variabel independen secara individual atas variabel terikat dengan pengujian signifikan koefisien regresi (Ghozali, 2021).

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dipergunakan mengevaluasi seberapa efektif kompetensi model regresi menjabarkan variabel terikat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Melihatkan arah korelasi variabel terikat pada variabel bebas. Arah hubungan dapat dilihat dari tanda koefisien regresi, apakah bernilai positif atau negatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{INTEGRITY} = \alpha + \beta_1 \text{FIND} + \beta_2 \text{OPINION} + \beta_3 \text{TRANS} + \epsilon$$

Keterangan:

INTEGRITY = Tingkat Integritas

FIND = Temuan Audit

OPINION = Opini Audit

TRANS = Transparansi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten selama periode 2021–2024. Data penelitian diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan hasil Survei Penilaian Integritas KPK.

Tabel 1
Sampel Penelitian

<i>Keterangan</i>	<i>Total</i>
Jumlah Kota/ Kabupaten	8
(dikali banyaknya tahun penelitian)	4
Sampel awal	32
Sampel penelitian (data yang diolah)	32

Sumber : Data diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan tabel 1, jumlah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten sebanyak 8 pemerintah daerah. Dengan periode penelitian selama 4 tahun, yaitu tahun 2021–2024, maka jumlah sampel awal penelitian sebanyak 32 sampel. Seluruh data dapat digunakan dalam penelitian sehingga total sampel penelitian (data yang diolah) berjumlah 32 sampel.

Analisis Statistik Deskriptif

Pada hasil yang diperoleh dari statistik deskriptif sebagaimana tertera pada tabel dibawah, sebagai berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	32	7,00	18,00	11,8437	2,93048
Opini Audit	32	1,00	3,00	1,3750	,79312
Transparansi	32	1,00	5,00	4,3750	1,33803
Tingkat Integritas	32	64,01	76,91	70,8328	3,38450
Valid (listwise)	N 32				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2026)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan. Pada uji normalitas memakai uji *oone sample kolmogrov-smirnov* hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,154 > 0,05$, bahwa model regresi tercapai. Uji multikolinearitas terdapat nilai tolerance $> 0,10$ nilai VIF < 10 , melihatkan tidak ada korelasi antar variabel. Uji autokorelasi menghasilkan nilai sebesar 1,38 melihatkan tidak ada tanda-tanda autokorelasi. Uji heterokedastisitas memiliki nilai lebih besar dsari 0,05, tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji One Sample K-S

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.23671276
Most Extreme Diffences	Absolute	.134
	Positive	.070
	Negative	-.134
Test Statistic		134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
Temuan Audit	.992	1,008
Opini Audit	.972	1,029
Transparansi	.964	1,037

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2026)

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.292 ^a	.085	-.013	3.40570	1.380

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 6 Hasil Uji t

<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	68,981	21,530	.000
Temuan Audit	-.123	-.587	.562
Opini Audit	.410	.524	.604
Transparansi	.628	1,348	.189

Sumber: Data sekunder yang diolah (2026)

Dari hasil yang diperoleh pada tabel di atas, maka persamaan regresi menjadi:

$$INTEGRITY = 68,981 - 0,123 FIND + 0,410 OPINION + 0,628 TRANS + \varepsilon$$

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Integritas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel temuan audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,123 dengan nilai signifikansi sebesar 0,562, meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif sesuai dengan hipotesis, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat integritas ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyaknya temuan audit yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tentu mencerminkan rendahnya tingkat integritas pemerintah daerah. Temuan audit lebih menggambarkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan temuan audit tersebut tidak secara langsung menentukan tinggi atau rendahnya integritas, karena integritas juga dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi audit. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (S. T. S. Ningsih & Haryanto, 2022) serta (Panji & Utomo, 2023) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten. Dengan kata lain, pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan audit lebih banyak belum tentu memiliki tingkat integritas yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah lainnya.

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Integritas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki nilai t hitung sebesar 0,524 serta nilai signifikansi sebesar 0,604, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten. Dengan demikian, H_2 yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat integritas ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan opini audit yang baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), belum tentu mencerminkan tingkat integritas yang tinggi. Opini audit pada dasarnya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, opini audit lebih menekankan aspek akuntabilitas pelaporan keuangan dan tidak secara langsung mengukur perilaku etis atau budaya integritas dalam organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pertwi & Haryanto, 2022) serta (S. T. S. Ningsih & Haryanto, 2022) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Dalam penelitian ini, hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas opini audit yang diperoleh pemerintah daerah di Provinsi Banten belum mampu menjelaskan variasi tingkat integritas yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Integritas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t sebesar 1,348 dengan nilai signifikansi sebesar 0,189, yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat integritas ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui situs resmi pemerintah daerah belum tentu mencerminkan tingginya tingkat integritas. Transparansi yang bersifat administratif, seperti penyediaan dokumen anggaran dan laporan keuangan, tidak selalu diikuti dengan pemanfaatan informasi oleh masyarakat maupun pengawasan publik yang efektif. Akibatnya, transparansi belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan integritas. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khikmah & Purwanto, 2023) serta (S. T. S. Ningsih & Haryanto, 2022) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah di Provinsi Banten belum menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan tingkat integritas. Integritas kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan komitmen anti-korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit, opini audit, dan transparansi terhadap tingkat integritas pemerintah daerah di Provinsi Banten periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa temuan audit, opini audit, dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit, kualitas opini audit, dan tingkat keterbukaan informasi belum mampu menjelaskan variasi tingkat integritas pemerintah daerah. Dengan demikian, tingkat integritas kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan komitmen anti-korupsi.

KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada pemerintah daerah di Provinsi Banten dengan jumlah observasi yang relatif kecil. Selain itu, variabel independen yang digunakan hanya mencakup temuan audit, opini audit, dan transparansi, sehingga belum mencakup faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi tingkat integritas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan penguatan budaya integritas melalui peningkatan komitmen pimpinan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi hasil audit. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas transparansi informasi agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendukung pengawasan publik yang efektif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia, menambah

periode pengamatan, serta memasukkan variabel lain seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tindak lanjut hasil audit, kualitas kepemimpinan, dan budaya organisasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat integritas.

REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2021). *Auditing and Assurance Services* (17th ed.). Pearson.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE*. 3, 305–360.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN FAIRNESS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)*. 12, 1–13.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. 2, 1–87.
- Naibaho, E. N. S., & Shanti, Y. K. (2021). *PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI, TINDAKLANJUTI HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA*. 6.
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook* (OECD Publi).
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). *PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015- 2020)*. 12(2018), 1–9.
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). *PENGARUH OPINI AUDIT , TEMUAN AUDIT , DAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI JAWA TENGAH*. 11(2021), 1–8.
- Triya Setia Ningsih, S. (2022). *PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI*. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>